



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



Kemenkum Kalsel News

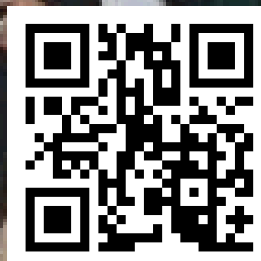
E-Buletin Edisi Pekan Keempat November



**Kemenkum Kalsel Tegaskan
Layanan Inklusif Daerah**

**Kemenkum Kalsel
Serahkan Sertifikat
Merek UMKM**

**Penguatan Kinerja
Kemenkum Kalsel Ikuti
Rapat Anev 2025**



kalsel.kemenkum.go.id

Terhubung lebih dekat:



YouTube



kemenkumkalsel

24 November 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Pembukaan Konsolidasi dan Finalisasi PIPK Tahun 2025 di Jakarta



Jakarta, TUM_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan Konsolidasi dan Finalisasi Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum Tahun 2025 yang resmi dibuka pada Minggu, 23 November 2025, bertempat di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, bersama Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Kalsel. Acara pembukaan turut dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Barang Milik Negara, serta pejabat manajerial dan non-manajerial dari seluruh satuan kerja Kementerian Hukum.

Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Eni Fitriah, selaku Ketua Pelaksana. Ia menyampaikan bahwa konsolidasi dan finalisasi PIPK bertujuan memastikan laporan hasil penilaian tahun 2025 disusun secara memadai, akurat, dan sesuai ketentuan, sehingga dapat memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan kementerian.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Keuangan, Sri Yusfini Yusuf, menegaskan bahwa PIPK merupakan instrumen penting yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan andal dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Ia menekankan bahwa penguatan PIPK adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Setelah sambutan, kegiatan dibuka secara resmi oleh Sri Yusfini Yusuf bersama Kepala Biro Barang Milik Negara, Itun Wardatul Hamro.



Acara berlanjut dengan diskusi panel oleh dua narasumber. Puji Agus, Widyaiswara Ahli Utama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, memaparkan strategi optimalisasi perencanaan, penilaian, dan pelaporan PIPK. Narasumber kedua, Muhammad Taufik dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, membahas reviu Penilaian PIPK berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2019, untuk memastikan kualitas dan objektivitas hasil penilaian.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian pelaporan keuangan serta mendukung upaya kementerian dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.



24 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Apel Pagi, Pembina Apresiasi Semangat Pegawai



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (24/11/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, yang bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Dewi Woro Lestari menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat seluruh pegawai yang tetap mengikuti apel meskipun lingkungan kantor tengah terdampak banjir. Ia menekankan bahwa komitmen untuk menjaga kedisiplinan merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pembina apel juga mengingatkan seluruh unit kerja untuk segera menyampaikan laporan B12 kepada Tim Kerja Pengelolaan Pelaporan dan Perencanaan, mengingat pentingnya ketepatan waktu dan ketertiban administrasi dalam mendukung sistem evaluasi kinerja.

Menutup arahnya, Dewi Woro Lestari menyampaikan bahwa dirinya menyampaikan beberapa poin inti yang perlu menjadi perhatian bersama, serta mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga kinerja, kekompakan, dan integritas dalam menjalankan tugas.

Apel pagi berjalan dengan tertib dan mencerminkan semangat kerja jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.



24 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Uji Kompetensi Teknis Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembukaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum pada Senin (24/11).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan SDM serta para peserta Uji Kompetensi dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam arahannya ia menyampaikan bahwa Uji Kompetensi Teknis merupakan bagian penting dari pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dalam menopang kebijakan transformasi birokrasi.

“Ukom ini merupakan instrumen untuk memastikan kompetensi teknis ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi serta mendukung visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Selain itu, Kepala BPSDM Hukum juga mengingatkan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, mengingat hasil uji kompetensi akan berdampak pada pengembangan karir dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Uji Potensi serta Analisa Kasus yang harus diselesaikan oleh seluruh peserta sesuai standar kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum.



24 November 2025

Kemenkum Kalsel Fasilitas Rapat Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris Kabupaten Banjar



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memfasilitasi pelaksanaan Rapat Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Banjar. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Senin (24/11/2025), sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penegakan integritas dalam penyelenggaraan jabatan notaris.

Majelis Pemeriksa Notaris Kabupaten Banjar melaksanakan rapat untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, serta penelaahan terhadap dugaan pelanggaran atau laporan terkait pelaksanaan tugas jabatan notaris di wilayah tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan setiap notaris bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, serta standar pelayanan yang akuntabel.

Perwakilan Kemenkum Kalsel menyampaikan dukungan penuh terhadap proses pengawasan yang dijalankan MPD.

“Pengawasan adalah instrumen penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas notaris. Kami memastikan proses berjalan objektif dan transparan demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara MPD Kabupaten Banjar dan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memperkuat pembinaan serta memastikan seluruh mekanisme pengawasan berjalan efektif.

Melalui rapat pemeriksaan ini, Kemenkum Kalsel menegaskan komitmen untuk terus mendukung pengawasan notaris di daerah sehingga kualitas layanan kenotariatan tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara profesional dan berintegritas.



24 November 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Konsultasi Ranperda TJSL Perusahaan bersama Pemkab Tapin dan DPRD Tapin



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) A DPRD Kabupaten Tapin dalam rangka rapat konsultasi dan komparasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Kegiatan berlangsung pada Senin, 24 November 2025, di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, bersama jajaran perancang. Dari pihak DPRD Tapin, hadir H. Taufik Hidayat selaku Wakil Ketua Pansus A, didampingi tiga orang anggota DPRD Tapin yang tergabung dalam Pansus A. Konsultasi ini merupakan bagian dari agenda resmi DPRD Tapin sebagaimana tertuang dalam surat nomor 000.1.2.2/1383/DPRD-TPN/2025.

Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Tapin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapin, Nordin, beserta jajarannya, serta perwakilan dari Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Tapin. Kehadiran unsur eksekutif daerah ini memperkuat ruang diskusi agar penyusunan Ranperda TJSLP selaras dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan penguatan terkait aspek harmonisasi, konseptualisasi norma, serta kedudukan Ranperda TJSLP dalam kerangka hukum nasional. Diskusi berjalan dinamis dan berfokus pada optimalisasi peran perusahaan dalam kontribusi sosial dan lingkungan secara terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, mengapresiasi langkah proaktif DPRD dan Pemkab Tapin dalam memperkuat pengaturan TJSLP.

“Kami menyambut baik komitmen DPRD dan Pemkab Tapin dalam memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ranperda ini harus mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus mendorong perusahaan berperan nyata dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Alex Cosmas Pinem menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap terus memberikan pendampingan teknis.

“Kemenkum Kalsel berkewajiban memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kami siap mendukung proses penyempurnaan Ranperda hingga tahap final,” tegasnya.

Dengan berlangsungnya konsultasi ini, Pansus A DPRD Tapin memperoleh masukan penting untuk penyempurnaan naskah akademik dan materi muatan Ranperda sebelum memasuki pembahasan lanjutan pada tingkat daerah.

24 November 2025

Dua Pegawai Kemenkum Kalsel Ikuti Uji Kompetensi Teknis Analisis Hukum



Banjarmasin, Humas_info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) kembali menunjukkan komitmen dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dua pegawainya dalam Uji Kompetensi (Ukom) Teknis Analisis Hukum yang digelar secara virtual pada Senin (24/11/2025).

Pelaksanaan UKOM ini merujuk pada Surat Pemanggilan BPHN Nomor PHN-KP.06.02-383 tanggal 20 November 2025 tentang pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Analisis Hukum dalam rangka pengangkatan dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum.

Dua peserta dari Kanwil Kemenkum Kalsel yang mengikuti ujian pada pengangkatan sebagai Analisis Hukum Ahli Pertama adalah: Iyut Mariyanti dan Muhammad Riza

Adapun metode uji kompetensi dibagi ke dalam beberapa tahapan, antara lain:

- Tes Potensi
- Analisis Kasus
- Wawancara (berdasarkan standar kompetensi jabatan)

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, memberikan dukungan penuh kepada para peserta yang mengikuti UKOM tersebut.

“Penguatan jabatan fungsional merupakan bagian penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur hukum. Kami berharap melalui Uji Kompetensi ini, pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujar Alex.

Lebih lanjut, Kakanwil menekankan bahwa kesiapan SDM merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung transformasi birokrasi serta mewujudkan layanan hukum yang berkualitas, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Hukum. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap semakin banyak pegawai yang terus mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui mekanisme pembinaan dan pengembangan karier yang berkelanjutan.

25 November 2025

Kemenkum Kalsel Serahkan 22 Sertifikat Merek untuk UMKM Hulu Sungai Tengah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas perlindungan Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha daerah melalui penyerahan 22 sertifikat merek kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Senin (24/11/2025).

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Sertifikat yang diserahkan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi UMKM dan pelaku usaha dalam menjaga identitas produk serta meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Dalam sambutannya, Riswandi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas upaya berkelanjutan dalam mendorong pelaku usaha mendaftarkan merek mereka. Ia juga berharap semakin banyak UMKM memanfaatkan layanan pendaftaran KI sebagai langkah konkret penguatan usaha.

Lebih lanjut, Riswandi meminta dukungan Dinas Perdagangan Kabupaten HST untuk turut menggerakkan pendaftaran merek kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai upaya mendorong legalitas dan perlindungan usaha masyarakat.

Pihak Dinas Perdagangan HST menyambut baik dorongan tersebut dan menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah menggerakkan operasional Koperasi Merah Putih sebagai langkah awal memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat lokal.



Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama setelah proses penyerahan sertifikat dan diskusi mengenai penguatan layanan KI ke depan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kemenkum Kalsel berharap sinergi dengan pemerintah daerah semakin solid dalam memperluas kesadaran dan pemanfaatan layanan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat.



25 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Konsolidasi dan Finalisasi Penilaian PIPK 2025, Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan



Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Finalisasi Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berlangsung pada 23–24 November 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama dua JFU Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN. Rangkaian kegiatan dimulai pada Minggu (23/11), ketika tim penilai PIPK dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum melakukan verifikasi terhadap dokumen PIPK yang telah disusun oleh Kanwil Kemenkum Kalsel.

Pendampingan ini bertujuan memastikan penilaian PIPK dilakukan secara efektif dan mampu memberikan keyakinan memadai atas kualitas pelaporan keuangan yang andal, sesuai standar akuntansi pemerintah, serta mendorong meningkatnya akuntabilitas penyajian laporan keuangan.

Dalam proses verifikasi, tim penilai menyampaikan bahwa terdapat beberapa dokumen PIPK yang perlu diperbaiki. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Senin (24/11), tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel langsung melakukan penyempurnaan dan melengkapi dokumen dimaksud. Perbaikan tersebut kemudian diverifikasi ulang dan dinyatakan lengkap serta sesuai oleh tim penilai.

Di sela kegiatan, peserta juga mengikuti sesi sharing session bersama narasumber dari Pusdiklat Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Puji Agus, serta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Muhammad Taufik, yang membahas pendalaman lebih lanjut mengenai penilaian PIPK. Hasil akhir verifikasi Penilaian PIPK dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kalsel Rustam Sakka, serta Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Eni Fitriah.



Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dokumen dan proses PIPK sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum.



25 November 2025

Kemenkum Kalsel Dorong Kepastian Hukum Batas Desa melalui Harmonisasi Ranperbup Tanah Laut



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperbup) Kabupaten Tanah Laut (Tala) tentang Penetapan Batas Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari sebagai bagian dari tugas pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah pada Selasa (25/11).

Kegiatan dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai pemrakarsa penyusunan regulasi.

Dalam draf Ranperbup yang diharmonisasi, diatur mengenai penetapan batas wilayah administratif Desa Guntung Besar meliputi uraian batas bagian utara, selatan, timur, barat hingga pemetaan titik-titik koordinat kartometrik serta peta batas desa sebagai lampiran peraturan.

Bahjatul Mardhiah menyampaikan bahwa penetapan batas wilayah sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pengelolaan pembangunan desa. Dengan adanya Peraturan Bupati, maka data batas desa dapat menjadi acuan yang sah secara legal maupun teknis.

Ranperbup ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan perundang-undangan terkait penataan wilayah desa, serta berpedoman pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, sebagaimana turut dicantumkan dalam naskah hukum pemrakarsa.



Kegiatan harmonisasi berlangsung dinamis melalui pembahasan redaksional dan substansi norma, termasuk penguatan dasar hukum, konsistensi teknis pemetaan batas, dan kesesuaian dengan peta wilayah aktual. Melalui harmonisasi ini, diharapkan penyusunan Ranperbup dapat segera difinalisasi dan ditetapkan, sehingga kepastian batas Desa Guntung Besar dapat mendukung efektivitas pemerintahan daerah, administrasi pertanahan, hingga peningkatan ketertiban tata ruang wilayah di Kabupaten Tanah Laut.



25 November 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Pembahasan PKS Posbankum Desa/Kelurahan Bersama Korem, Polda, dan Kejati



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan pada Selasa, (25/11/2025). Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, dan turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, yang berpartisipasi melalui Zoom dan memberikan sambutan singkat mengenai pentingnya penguatan kolaborasi lintas lembaga.

Dalam penyampaianannya, Kakanwil menegaskan bahwa kerja sama yang akan ditandatangani bersama Korem 101/Antasari, Polda Kalsel, dan Kejati Kalsel merupakan bagian penting dari perluasan akses keadilan.

“Posbankum harus menjadi pintu pertama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum. Karena itu, sinergi kita hari ini adalah fondasi agar layanan ini berjalan efektif hingga ke desa dan kelurahan,” ujar Alex Cosmas Pinem.

Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian teknis dan persepsi antar instansi diperlukan sebelum penandatanganan PKS pada 3 Desember 2025 saat kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Selama rapat, perwakilan Korem 101/Antasari menyampaikan dukungan terhadap rencana pelaksanaan Posbankum serta pentingnya mekanisme koordinasi yang jelas, termasuk penetapan narahubung antar instansi. Korem juga menilai bahwa kolaborasi melalui peran Babinsa dapat memberikan nilai tambah bagi upaya penguatan layanan hukum, dengan pengaturan teknis yang akan disepakati dalam PKS.

Dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, perwakilan menyampaikan kesiapan untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Posbankum serta memastikan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri di berbagai kabupaten/kota dapat berjalan optimal. Kejati juga menegaskan komitmen untuk melakukan penyesuaian substansi PKS secara internal agar selaras dengan tugas dan fungsi kejaksaan dalam layanan hukum masyarakat.

Sementara itu, perwakilan Polda Kalsel menyampaikan dukungan penuh terhadap program Posbankum dan menilai bahwa PKS perlu memuat pembagian tugas yang terfokus, sinkron dengan MoU yang telah ditandatangani di tingkat pusat. Polda menilai bahwa ruang lingkup PKS yang disusun secara tepat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama di lapangan.

Rapat pembahasan ini menjadi momentum penting dalam memfinalisasi substansi PKS sebelum penandatanganan resmi. Melalui sinergi antara Kemenkum Kalsel, Korem 101/Antasari, Polda Kalsel, dan Kejati Kalsel, layanan Posbankum diharapkan dapat berjalan optimal, terstruktur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan.



25 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi 15 Permenkum Terkait Pelaksanaan Tusi Ditjen AHU Tahun 2025



Banjarmasin, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti kegiatan Sosialisasi 15 Peraturan Menteri Hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal AHU Tahun 2025, pada Selasa (25/11). Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta jajaran Tim Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Kalsel dari ruang kerja Bidang Pelayanan AHU.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen AHU bekerja sama dengan Unit Eselon II di lingkungan Ditjen AHU tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 November 2025. Agenda ini merupakan langkah percepatan internalisasi regulasi baru yang menjadi acuan pelaksanaan layanan AHU pada Tahun Anggaran 2025.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo, S.H., M.H. dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa 15 dari 21 Rancangan Peraturan Menteri yang ditargetkan telah berhasil diselesaikan dan siap untuk diterapkan. Sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian pembahasan, koordinasi antar kementerian/lembaga, hingga proses harmonisasi.

“Internalisasi regulasi adalah bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, seragam, dan akuntabel di seluruh jajaran pelaksana layanan administrasi hukum,” tegas Dirjen AHU.

Paparan diberikan langsung oleh masing-masing direktorat terkait, dilengkapi penjelasan teknis terkait perubahan norma dan implikasi pelaksanaannya di daerah. Sesi sosialisasi ditutup dengan tanya jawab untuk memastikan penyamaan persepsi serta kesiapan Kantor Wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara tepat dan berkualitas.

Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat kompetensi dan pemahaman pegawai dalam memberikan layanan AHU yang cepat, pasti, dan berintegritas, sejalan dengan agenda peningkatan tata kelola layanan hukum di tahun 2025.

25 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Program Nasional Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Program Nasional Pemagangan untuk lulusan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum pada Selasa, 25 November 2025.

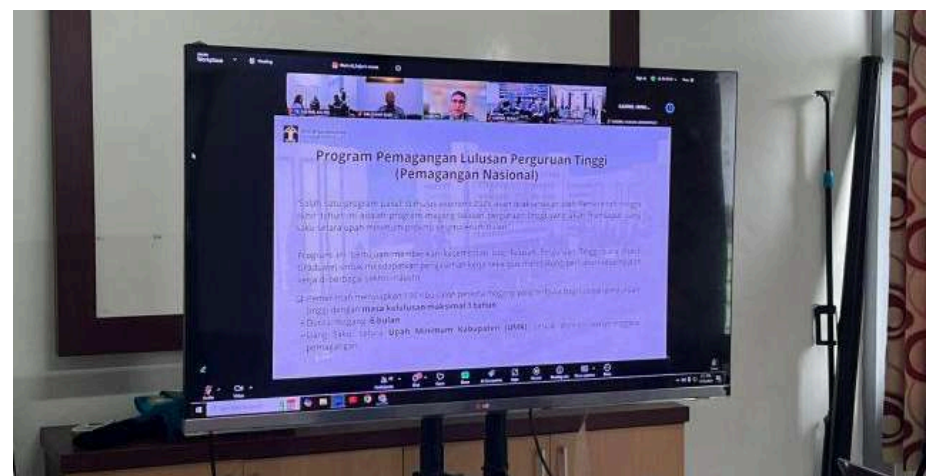
Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti dari Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, bersama Tim Kerja SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Kegiatan rapat ini menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/939/LP.03.00/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Program Pemagangan untuk lulusan perguruan tinggi, serta disposisi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum yang mengarahkan agar Kemenkum turut berpartisipasi dalam program nasional tersebut.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan pemagangan, kriteria peserta, serta peran masing-masing unit kerja dalam mendukung implementasi program. Melalui program nasional ini, Kementerian Hukum diharapkan dapat membuka ruang belajar, praktik, dan pembinaan kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi di berbagai satuan kerja.

Kanwil Kemenkum Kalsel akan mendukung dan menindaklanjuti arahan pusat, termasuk melakukan pemetaan kebutuhan pemagangan serta koordinasi unit terkait untuk kesiapan fasilitas dan pendampingan.

Rapat berjalan lancar dan diakhiri dengan penyampaian tindak lanjut administrasi serta kesiapan masing-masing satuan kerja dalam mendukung program nasional pemagangan tersebut.



25 November 2025

Penyelarasan Kesepahaman Bersama Stakeholder, Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Koordinasi Secara Daring



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat daring terkait pembahasan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada Selasa (25/11/2025) sebagai tindak lanjut rangkaian persiapan menjelang kedatangan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas pada awal Desember mendatang.

Rapat yang diselenggarakan melalui platform aplikasi meeting daring ini dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, didampingi oleh Tulus Achir Cahyadi, Penyuluh Hukum Pertama, serta diikuti oleh jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mempersiapkan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi se-Kalimantan Selatan, yang direnakan akan dilaksanakan pada 3 Desember 2025 bertepatan dengan rencana peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama rapat, para peserta membahas secara teknis substansi kerja sama yang akan dituangkan dalam MoU, mencakup bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta pelayanan hukum, sebagaimana tercantum dalam draf kesepakatan bersama. Pembahasan ini bertujuan memastikan seluruh pihak memiliki kesamaan persepsi, kejelasan ruang lingkup, dan kesiapan pelaksanaan sebelum Nota Kesepahaman ditandatangani.



Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum, mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, serta memperluas kemudahan akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan.



25 November 2025

Komitmen Tingkatkan Layanan KI, Kemenkum Kalsel Ikut Workshop Bersama WIPO



Banjarmasin, KI_Info – Jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Workshop on WIPO Intellectual Property (IP) Diagnostic Tool yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), Selasa, 25 November 2025.

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari ruang kerja masing-masing oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, beserta seluruh jajaran Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel.

Workshop ini bertujuan memperkenalkan WIPO IP Diagnostics Tool, sebuah perangkat penilaian mandiri yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi potensi aset Kekayaan Intelektual serta memahami langkah pengelolaannya secara strategis.

Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima pemaparan langsung dari narasumber WIPO mengenai cara kerja IP Diagnostic Tool, manfaat bagi UMKM dan pelaku usaha baru, serta bagaimana alat ini dapat digunakan sebagai pendukung konsultasi maupun pendampingan KI di daerah.

Menanggapi pelaksanaan workshop, Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pegawai merupakan kunci dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang KI.

“Workshop ini sangat bermanfaat bagi kami di daerah. Dengan memahami lebih dalam IP Diagnostic Tool dari WIPO, kami dapat memberikan layanan konsultasi dan pendampingan yang lebih tepat sasaran, terutama bagi pelaku usaha dan UMKM di Kalimantan Selatan,” jelasnya.



Riswandi juga menambahkan bahwa pemanfaatan alat diagnostik ini dapat membantu identifikasi awal potensi KI pada usaha masyarakat. “Kami berharap seluruh jajaran dapat mengoptimalkan pengetahuan ini dalam kegiatan pelayanan maupun edukasi publik, sehingga literasi KI di daerah semakin meningkat,” ujarnya.

Partisipasi jajaran Bidang KI Kemenkum Kalsel dalam workshop ini diharapkan dapat memperkuat strategi pendampingan aset intelektual bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Selatan.



25 November 2025

Kemenkum Kalsel Mantapkan Langkah Strategis Pembangunan Hukum, Koordinasi dengan BPHN Bahas Peresmian 2.016 Posbankum Desa/Kelurahan



Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan hukum dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari langkah strategis pencapaian kinerja tahun 2025, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex C. Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton E. Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, serta jajaran terkait, melaksanakan koordinasi langsung dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, Selasa (25/11).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam membahas berbagai capaian program, pemenuhan rencana aksi, dan sejumlah agenda pembangunan hukum yang akan dilaksanakan Kantor Wilayah pada tahun mendatang. Jajaran Kanwil diterima langsung oleh Kepala BPHN, Mien Usihen, bersama Sekretaris BPHN dan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.

Dalam diskusi, Kakanwil menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan berhasil menuntaskan salah satu program prioritas nasional, yaitu pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Dengan total 2.016 desa/kelurahan, Kalimantan Selatan menjadi wilayah yang telah mencapai 100% pembentukan Posbankum. Atas pencapaian tersebut, Kakanwil mengusulkan rencana peresmian Posbankum secara resmi di Kalimantan Selatan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Kakanwil juga menyampaikan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung peresmian, meliputi Kick-Off Pelatihan Paralegal, Penandatanganan MoU dan PKS bersama Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Instansi Vertikal, Pameran Layanan Hukum, serta agenda pendukung lainnya.



Kepala BPHN, Mien Usihen, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan capaian Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mewujudkan pembangunan hukum hingga terimplementasinya Posbankum di seluruh desa/kelurahan. BPHN juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana peresmian tersebut, serta meminta Kanwil untuk mempersiapkan aspek teknis dan substansi secara matang.

Lebih lanjut, BPHN mendorong agar Kanwil Kemenkum Kalsel terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, serta penyelenggaraan Bantuan Hukum di wilayah Kalimantan Selatan. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan pembangunan hukum berjalan maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Kegiatan koordinasi ini berlangsung lancar dan menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenkum Kalsel untuk memperkuat kolaborasi dengan BPHN dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara merata, berkelanjutan, dan berdampak nyata di seluruh wilayah.



26 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Jadi Narasumber Bimtek Pengolahan Hasil Peternakan, Tekankan Pentingnya Perlindungan HKI



Banjarbaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Peternakan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (25/11) di Ruang Pertemuan Kelapa Sawit, Banjarbaru.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai instansi terkait untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai standar legalitas dan sertifikasi yang dibutuhkan bagi produk olahan peternakan dan perkebunan, mulai dari Halal, PIRT, NKV, BPOM hingga Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalsel, Hj. drh. Suparmi, MS, yang menegaskan pentingnya memberikan nilai tambah pada hasil peternakan agar mampu bersaing dan dilindungi secara hukum. Ia menekankan bahwa potensi olahan peternakan dan perkebunan di Kalimantan Selatan sangat besar, sehingga perlu didukung dengan pemahaman sertifikasi dan perlindungan hukum yang tepat.

Sebagai perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel, Nurkesuma Febby Ikaningtiyas, CPNS Kementerian Hukum, menyampaikan materi mengenai Kekayaan Intelektual yang meliputi perlindungan merek, desain industri, paten sederhana, dan hak cipta. Materi tersebut relevan dengan kebutuhan pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang mengembangkan produk olahan peternakan.

Melalui pemaparan tersebut, peserta diharapkan memahami pentingnya HKI sebagai instrumen perlindungan dan penguatan nilai ekonomi produk. Perlindungan HKI diyakini mampu membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap produk lokal Kalimantan Selatan.



Kegiatan berjalan interaktif dan mendapatkan antusiasme peserta yang ingin mengetahui proses pendaftaran, manfaat, serta peluang perlindungan HKI untuk mendukung pengembangan usaha mereka.

Kanwil Kemenkum Kalsel melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual akan terus berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas produk lokal, termasuk melalui edukasi dan layanan fasilitasi HKI.



26 November 2025

Dukung Ekosistem Kreatif, Kemenkum Kalsel Hadir di Cangkurah Fest 2025



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berpartisipasi dalam gelaran Cangkurah Kreatif Festival 2025 yang berlangsung di Siring Mitra Plaza, Banjarmasin. Partisipasi ini menjadi bentuk komitmen Kemenkum Kalsel dalam mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif daerah melalui penguatan pemahaman hukum dan perlindungan kekayaan intelektual.

Festival yang digelar pada 21–23 November 2025 ini diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR, dan turut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor. Pembukaan ditandai dengan pelepasan lampion di Sungai Martapura yang menjadi simbol harapan bagi semakin berkembangnya kreativitas generasi muda Banjarmasin.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel di kesempatan ini diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Aji Rifani, yang turut melakukan komunikasi aktif dengan para pelaku industri kreatif mengenai pentingnya perlindungan KI.

Aji Rifani menyampaikan bahwa keterlibatan Kemenkum Kalsel dalam Cangkurah Fest merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan KI kepada masyarakat, khususnya para kreator muda.

“Banyak karya kreatif lokal yang sebenarnya memiliki potensi besar, baik secara ekonomi maupun identitas budaya. Tugas kami adalah memastikan mereka memahami cara melindungi karya tersebut melalui instrumen hukum yang tepat,” ujarnya.



Berbagai kegiatan tersaji dalam festival ini, mulai dari pameran produk kreatif, diskusi, hingga pertunjukan seni. Kanwil Kemenkum Kalsel melihat bahwa banyak karya yang ditampilkan berpeluang mendapatkan perlindungan hukum, mulai dari hak cipta, merek, hingga kekayaan intelektual komunal.

Aji juga menambahkan bahwa Kemenkum Kalsel siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menghadirkan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif.

“Kami mengapresiasi upaya Pemkot Banjarmasin yang konsisten memberikan ruang bagi tumbuhnya ekonomi kreatif. Ke depan, kami siap berkolaborasi untuk memperluas literasi KI di masyarakat,” ungkapnya.

Melalui partisipasi dalam Cangkurah Fest 2025, Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah pelaku kreatif, memastikan setiap karya yang lahir dari kreativitas masyarakat tidak hanya bernilai komersial, tetapi juga terlindungi secara hukum.



26 November 2025

Pameran Tunggal Misbach Tamrin, Momentum Sinergi Pelindungan Seni dan Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut hadir dan memberikan dukungan pada Pameran Tunggal Misbach Tamrin bertema “Rindang Budaya” yang diselenggarakan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Pameran yang digelar di Gedung Wargasari tersebut menampilkan 21 karya lukisan yang merefleksikan kekayaan nilai, tradisi, dan spirit kebudayaan Nusantara.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin dan turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, serta kurator pameran Hajriansyah, juga para seniman dan budayawan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Aji Rifani, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda yang hadir mewakili Kemenkum Kalsel, sebagai wujud komitmen dalam mendukung pemajuan kebudayaan sekaligus memperkuat pelindungan hukum terhadap karya intelektual.

“Kami menilai penting untuk memastikan karya seni rupa seperti yang ditampilkan dalam pameran ini memperoleh pelindungan hak cipta. Karya seni bukan hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga nilai ekonomi yang perlu dijaga melalui instrumen hukum,” jelasnya.

Pameran ini juga membuka ruang apresiasi terhadap perjalanan panjang Misbach Tamrin, seniman berusia 84 tahun yang tetap konsisten berkarya. Salah satu karya yang menarik perhatian adalah “Perempuan Nusantara”, sebuah masterpiece yang dibuat pada 1977 ketika ia berada dalam masa tahanan politik. Karya tersebut merefleksikan keteguhan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa meski dalam situasi penuh tekanan.



“Kami mengapresiasi dedikasi dan ketekunan Misbach Tamrin yang tetap produktif berkarya di tengah berbagai tantangan hidup. Semangat ini sejalan dengan visi Kemenkum untuk mendukung ekosistem kreatif yang inklusif, maju, dan berkelanjutan,” tambah Aji Rifani.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan para seniman dan budayawan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pelindungan hukum terhadap karya seni. Upaya ini diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan kekayaan intelektual.



26 November 2025

Dorong Perlindungan Karya Ilmiah, LLKM Tanah Bumbu Konsultasikan Hak Cipta



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan koordinasi dari Tim Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LLKM) Tanah Bumbu, Kementerian Kesehatan RI, pada Selasa (25/11/2025). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait proses pencatatan ciptaan dan perlindungan Hak Cipta atas karya-karya yang dihasilkan oleh LLKM Tanah Bumbu.

Pertemuan berlangsung di ruang layanan Kantor Wilayah dan disambut oleh Tim Layanan Kekayaan Intelektual bersama Tim LLKM Tanah Bumbu. Pada kesempatan tersebut, Tim Loka Laboratorium menyampaikan kebutuhan lembaga untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pencatatan ciptaan, mengingat banyaknya karya ilmiah, laporan, pedoman, serta modul pelatihan yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi laboratorium.

Tim Layanan KI memberikan penjelasan secara rinci mengenai alur pengajuan pencatatan ciptaan, persyaratan dokumen yang diperlukan, manfaat perlindungan Hak Cipta, hingga masa berlaku perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini menjadi ruang edukasi sekaligus pendampingan awal bagi LLKM Tanah Bumbu dalam mempersiapkan proses pencatatan ciptaan secara resmi.

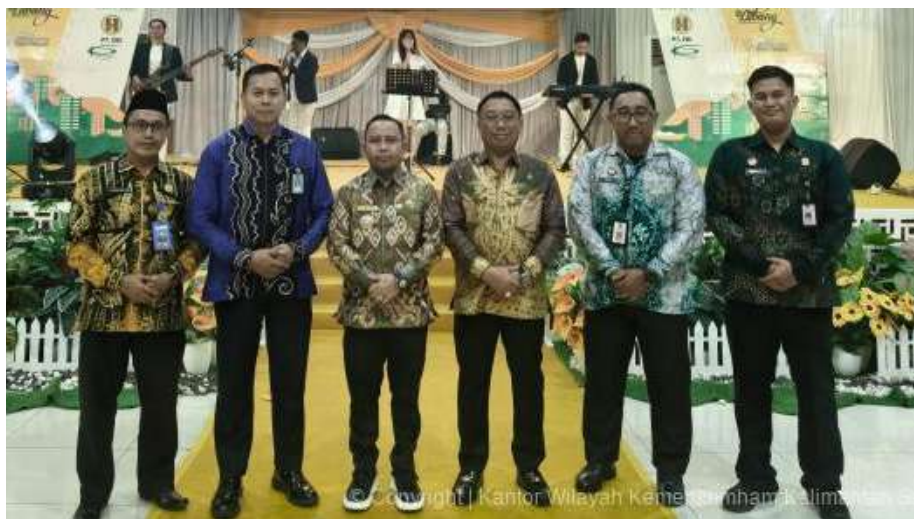
Melalui sesi diskusi, Tim LLKM Tanbu memperoleh pemahaman terkait pentingnya perlindungan Hak Cipta demi menjaga keaslian karya, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan karya yang dihasilkan mendapatkan hak eksklusif sesuai ketentuan Hak Kekayaan Intelektual.

Kegiatan konsultasi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kesadaran KI di lingkungan LLKM Tanah Bumbu, sekaligus mendorong percepatan pengajuan pencatatan ciptaan agar seluruh karya institusi memperoleh perlindungan hukum yang memadai.



26 November 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Penganugerahan KRISDA Tapin 2025, Dorong Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri acara Penganugerahan Kreativitas dan Inovasi Daerah (KRISDA) Tapin Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pendopo Galuh Bastari Rantau Baru, Selasa (25/11) malam.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Bappelitbang ini merupakan bentuk apresiasi kepada ASN, perangkat daerah, dan masyarakat atas ide serta inovasi yang mendukung pembangunan daerah.

Acara diawali dengan registrasi peserta, hiburan, dan dilanjutkan dengan pembukaan melalui menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta pembacaan doa.

Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga, dalam laporannya menyampaikan bahwa KRISDA 2025 menjadi bagian dari upaya mendorong Kabupaten Tapin meraih predikat sebagai salah satu kabupaten terinovatif tingkat nasional pada Tahun 2026.

Bupati Tapin, H. Yamani, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada para inovator yang telah menghasilkan berbagai gagasan kreatif demi kemajuan Kabupaten Tapin. Ia menegaskan bahwa penguatan ekosistem inovasi diyakini mampu meningkatkan daya saing Tapin hingga ke tingkat nasional.

Penganugerahan KRISDA Tapin Tahun 2025 diberikan melalui tiga kategori, yaitu: 1. Kreativitas dan Inovasi Daerah Kategori ASN; 2. Kreativitas dan Inovasi Daerah Kategori Masyarakat Umum; dan 3. Perangkat Daerah Terinovatif.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, turut hadir bersama Tim Layanan Kekayaan Intelektual sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan inovasi daerah yang selaras dengan upaya peningkatan pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Kalimantan Selatan.

Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang serta penampilan hiburan.



26 November 2025

DWP Kemenkum Kalsel Gelar #DWPMengajar di SMPN 1 Banjarmasin Peringati HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan #DWPMengajar yang digelar di Aula SMPN 1 Banjarmasin pada Rabu, 26 November 2025.

Kegiatan ini mengusung tema nasional “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”, sebagai wujud komitmen DWP dalam mendukung pembangunan karakter generasi muda melalui edukasi, pembinaan, dan kepedulian sosial.

Acara dihadiri langsung oleh Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kalsel, Herlina Alex Cosmas Pinem, beserta jajaran pengurus DWP.



Dalam pelaksanaannya, DWP Kanwil Kemenkum Kalsel menggandeng para pejabat fungsional dari lingkungan Kemenkum Kalsel untuk memberikan materi penyuluhan hukum kepada para siswa.

Materi pertama disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Tulus Achir Cahyadi, yang membahas tentang pentingnya bijak bermedia sosial, ancaman hoaks, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media digital. Pembahasan ini sekaligus menjadi pengantar bagi para pelajar untuk memahami tantangan era digital yang semakin kompleks.

Materi berikutnya membahas secara mendalam isu anti bullying yang dibawakan oleh Analis Kebijakan Ahli Pertama, Safira Janet Araminta. Ia menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perundungan dapat terjadi di lingkungan sekolah, dampak psikologis bagi korban, serta langkah yang harus dilakukan jika mengalami atau melihat tindakan bullying. Penyampaian materi berlangsung hangat dan interaktif, dengan banyak siswa yang antusias bertanya dan berbagi pengalaman.



Ketua DWP Kanwil Kemenkum Kalsel, Herlina Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian DWP terhadap masa depan generasi muda. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan pendidikan akademik agar anak-anak memiliki kekuatan moral yang kokoh.

“Melalui #DWPMengajar ini, kami ingin hadir secara langsung untuk memberikan pemahaman yang relevan bagi anak-anak kita, terutama tentang bullying yang masih menjadi permasalahan serius di sekolah. Generasi muda harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan. Inilah kontribusi kami untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Herlina.



Melalui kegiatan ini, DWP Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung pendidikan, perlindungan anak, dan pembentukan karakter generasi muda di Kalimantan Selatan.

26 November 2025

Peacemaker Justice Award 2025: Penghargaan bagi Kepala Desa/Lurah Pelopor Penyelesaian Kasus di Posbankum



Jakarta - Persoalan hukum yang kian kompleks di masyarakat menuntut pendekatan penyelesaian yang lebih humanis, kolaboratif, dan tidak hanya bertumpu pada jalur persidangan. Sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo mengenai penguatan reformasi hukum, Pemerintah terus mendorong program strategis nasional guna mewujudkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa peningkatan kemampuan Kepala Desa/Lurah dalam penyelesaian sengketa melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan menjadi langkah penting dalam memperluas akses keadilan. Menurutnya, Kepala Desa/Lurah yang menjadi garda terdepan pelayanan publik memiliki peran kunci dalam mewujudkan access to justice berbasis masyarakat.

“Kepala Desa/Lurah dapat membantu mengupayakan penyelesaian permasalahan secara lebih humanis dan kolaboratif, dengan mengedepankan kebutuhan, hak, dan martabat masyarakat—people centered justice. Kegiatan Peacemaker Training yang telah kami lakukan merupakan bekal penting bagi mereka dalam menangani persoalan hukum nonlitigasi,” ujar Supratman dalam kegiatan Peacemaker Justice Award 2025, Rabu (26/11/2025) di Graha Pengayoman, Jakarta.

Peningkatan kompetensi ini memperkuat peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai (Non Litigation Peacemaker/NLP) dalam program Posbankum Desa/Kelurahan yang berkolaborasi dengan paralegal dan pemberi bantuan hukum terakreditasi. Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri.

Supratman menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi capaian tertinggi partisipasi Kepala Desa/Lurah sebagai NLP dengan jumlah 802 orang. Pada tahun 2023 tercatat 294 orang peraih gelar NLP, disusul 292 orang pada tahun 2024. Tren peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat peran juru damai di tingkat akar rumput.

Ia menegaskan bahwa Peacemaker Justice Award (PJA) bukan sekadar ajang seremoni, melainkan bentuk nyata apresiasi Pemerintah bagi Kepala Desa/Lurah yang aktif membentuk Posbankum, menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri, dan mendukung program-program strategis terkait akses keadilan. Tahun ini, setiap peserta PJA diwajibkan membentuk Posbankum sebagai langkah konkret mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Saat ini Posbankum telah terbentuk di 70.115 desa/kelurahan di 24 provinsi, menyediakan empat layanan utama: informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi, serta rujukan advokat. Hingga kini, sebanyak 3.839 layanan hukum telah diberikan oleh paralegal dan Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai.

Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Koalisi Akses Keadilan (Justice Action Coalition) di Madrid, Spanyol, 11 November 2025 lalu, Supratman kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas akses keadilan sesuai tujuan SDGs poin 16.3. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama dengan LKBH terakreditasi serta perguruan tinggi agar mahasiswa dapat belajar dan berkontribusi langsung melalui Posbankum.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, menilai pelaksanaan PJA merupakan langkah negara dalam memperkuat budaya hukum yang mengedepankan kearifan lokal melalui penyelesaian sengketa secara mandiri, bijak, dan damai. Menurutnya, Kepala Desa/Lurah adalah figur pertama yang menjadi tempat masyarakat mencari solusi hukum.



Peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menempatkan Kepala Desa/Lurah sebagai penjaga ketenteraman, ketertiban, serta penyelesai perselisihan masyarakat.

“Program PJA lahir dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat, tenggang rasa, dan tepa selira. Juru damai akan memperkuat mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan harmoni sosial,” ujar Sunarto.

Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 2.927.815 perkara di peradilan tingkat pertama, 30.217 perkara tingkat banding, dan 30.991 perkara di Mahkamah Agung. Kehadiran juru damai ini diyakini mampu mengurangi beban perkara di pengadilan melalui penyelesaian sengketa nonlitigasi.

Sunarto menegaskan bahwa mediasi terbaik terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat. Kesepakatan damai yang dicapai melalui juru damai menghasilkan solusi win-win tanpa merusak hubungan sosial atau menimbulkan kerugian ekonomi dan emosional sebagaimana sering terjadi dalam proses litigasi. Ia berpesan agar seluruh Kepala Desa/Lurah peraih gelar Non Litigation Peacemaker dapat menjalankan perannya secara profesional, menjadi mediator handal, dan senantiasa menjaga keharmonisan masyarakat. Kemudian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menilai terobosan PJA efektif menjangkau persoalan di desa/kelurahan sebagai miniatur Indonesia. Ia menekankan penguatan kuantitas dan kualitas paralegal sebagai ujung tombak penyelesaian perkara melalui mediasi dan musyawarah, tanpa harus selalu ke pengadilan.

Kepala BPHN, Min Usihen dalam laporannya menyampaikan, PJA merupakan bentuk apresiasi kepada Kepala Desa/Lurah yang aktif menyelesaikan perkara secara nonlitigasi dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan akses keadilan. Dari 130 peserta, telah dilakukan seleksi audisi untuk menentukan 10 peserta terbaik yang selanjutnya terpilih 3 peacemaker terbaik pada PJA 2025 diantaranya, Hemrinci Kepala Desa Anik Dingir, Kab. Landak Provinsi Kalimantan Barat, Margono Lurah Rejomulyo, Kota Metro Provinsi Lampung, dan Ahmad Gunawan Kepala Desa Baru Sari, Kab. Garut Provinsi Jawa Barat.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025 sebagai terobosan strategis dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas Kepala Desa dan Lurah sebagai juru damai merupakan langkah nyata memperluas fungsi Posbankum hingga menjangkau level komunitas.

“Pendekatan penyelesaian sengketa yang humanis, partisipatif, dan menjunjung nilai kearifan lokal sangat dibutuhkan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, sejalan dengan hal itu Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, serta para peacemaker di wilayah untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum yang sederhana, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.



26 November 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Pemantauan Perkembangan Politik Triwulan IV di Kesbangpol Kalsel



Banjarbaru, AHU_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menghadiri Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (26/11).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Provinsi Kalsel ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Forum ini bertujuan menyajikan gambaran terkini mengenai dinamika politik di Kalimantan Selatan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas wilayah.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, bersama tim Help Desk AHU. Dalam rapat tersebut, Dewi menyampaikan data terbaru mengenai perkembangan partai politik di Kalimantan Selatan. “Per hari ini, tercatat 67 partai politik yang telah terdaftar di Kalimantan Selatan. Data ini menjadi salah satu unsur penting dalam pemetaan situasi politik di daerah,” ujarnya.

Selain menyampaikan data, Dewi juga memberikan pandangan terkait pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga stabilitas politik daerah, terutama menjelang momentum kegiatan sosial dan politik pada akhir tahun.

Rapat turut dihadiri perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan mitra strategis pemerintah. Kanwil Kemenkum Kalsel berperan menyampaikan informasi dan analisis terkait aspek regulasi, kewarganegaraan, organisasi kemasyarakatan, dan dinamika hukum yang turut mempengaruhi situasi politik daerah.

Melalui forum pemantauan ini, seluruh unsur peserta menyampaikan laporan perkembangan politik di lingkungan masing-masing, termasuk potensi kerawanan, dinamika kelompok masyarakat, serta kegiatan organisasi politik. Hasil rapat akan menjadi dasar evaluasi bersama guna memperkuat deteksi dini dan menjaga kondisi politik Kalimantan Selatan tetap aman, tertib, dan kondusif.



26 November 2025

Penguatan Capaian Kinerja, Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Anev 2025



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja B11 Tahun 2025 yang digelar Sekretariat Jenderal pada Rabu (26/11/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Nico Afinta dan diikuti oleh seluruh unit utama, kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis secara daring.

Dari Kanwil Kalsel, hadir Kepala Kantor Wilayah, Kabid Pelayanan AHU Dewi Woro Lestari, Kabid Pelayanan KI Riswandi, Ketua Tim Kerja Pengelola Humas, Kerja Sama, Layanan Pengaduan dan TI, serta perwakilan Tim Kerja Penyuluh, Pengelola Program dan Pelaporan beserta jajaran.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target kinerja menjelang akhir tahun, termasuk kelengkapan data dukung Perjanjian Kinerja, pemenuhan Rencana Aksi RB, serta penyampaian LKjIP 2025 sesuai jadwal. Tahun 2025 juga merupakan masa transisi perencanaan sehingga laporan kinerja wajib disusun dalam dua versi, yakni PK lama (Jan-Okt) dan PK baru (Nov-Des).

Paparan Anev turut memuat perkembangan realisasi anggaran, peningkatan capaian Reformasi Birokrasi yang telah mencapai 100%, kenaikan Indeks BerAKHLAK menjadi 91,92, serta progres berbagai program digitalisasi seperti E-Arsip dan Srikandi yang melampaui target. Selain itu, seluruh satker diminta memperhatikan penyelesaian outstanding kontrak, optimalisasi serapan anggaran, serta memperkuat langkah-langkah akhir tahun.

Melalui partisipasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menyatakan komitmennya mendukung percepatan capaian kinerja strategis dan meningkatkan kualitas layanan di wilayah, sejalan dengan target nasional Kementerian Hukum.



26 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Pelatihan Komersialisasi KI untuk Perkuat Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional



Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual dengan modul Komersialisasi KI yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Senin, 24 November 2025. Pelatihan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dibuka resmi oleh Direktur Kerjasama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi komprehensif terkait analisis pasar dan strategi bisnis dalam pengembangan Kekayaan Intelektual. Analis KI Ahli Muda dan Madya dari Kanwil Kemenkum Kalsel mengikuti sesi dengan antusias, khususnya saat pemateri memaparkan teknik riset pasar aplikatif, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), serta penyusunan Business Model Canvas sebagai fondasi pemetaan potensi komersialisasi.

Peserta juga dibekali pemahaman mengenai penetapan pasar potensial menggunakan pendekatan TAM-SAM-SOM, yaitu Total Addressable Market (cakupan pasar terbesar), Serviceable Available Market (pasar yang dapat dilayani), dan Serviceable Obtainable Market (pasar yang realistis dapat diperoleh). Pendekatan ini dinilai penting untuk penghiliran inovasi dan pendampingan KI di daerah.

“Sesi hari ini sangat relevan dengan tantangan yang kami hadapi saat membantu UMKM dan para inventor lokal,” ujar salah satu peserta.

Melalui kegiatan ini, DJKI berharap kapasitas Analis KI semakin meningkat sehingga mampu memperkuat ekosistem KI nasional melalui proses komersialisasi yang lebih strategis dan berdampak.



27 November 2025

Kemenkum Kalsel Dalam Strategi Kunci Komersialisasi KI pada Hari Kedua Edukasi DJKI



Banjarmasin, KI_Info – Memasuki hari kedua rangkaian Edukasi Kekayaan Intelektual Modul Komersialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, para Analis Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan semakin memperdalam pemahaman mengenai strategi audit teknologi dan pemilihan bentuk perlindungan KI sebagai fondasi penting dalam komersialisasi inovasi, Selasa (25/11/2025).

Materi yang diberikan menekankan bahwa audit teknologi merupakan proses krusial untuk mengidentifikasi potensi komersial suatu inovasi, sementara pemilihan bentuk perlindungan KI yang tepat menjadi langkah strategis untuk memastikan nilai ekonomi inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sesi ini juga menghadirkan studi kasus keberhasilan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam mengkomersialkan salah satu paten yang berhasil mencapai valuasi hingga Rp 300 miliar. Pencapaian tersebut menjadi contoh nyata bahwa inovasi dalam negeri memiliki peluang besar untuk bersaing di tingkat global apabila didukung strategi perlindungan dan komersialisasi yang tepat.

Selain itu, peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai pentingnya Freedom to Operate (FTO) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa suatu produk dapat dipasarkan tanpa melanggar hak KI pihak lain. Penguasaan konsep ini diharapkan memperkuat peran Kemenkum Kalsel dalam memberikan pendampingan strategis kepada para inventor dan pelaku inovasi di daerah.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas kompetensi analis KI sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem kekayaan intelektual nasional.



Dampak Strategis Audit KI UGM (2020-2024)



Rangkuman Strategi Pemilihan Perlindungan KI

Perjalanan menuju perlindungan KI yang optimal memerlukan pemahaman mendalam tentang inovasi, tujuan bisnis, dan lanskap pasar kompetitif. Berikut adalah panduan terintegrasi untuk pengambilan keputusan strategis:

Sesuaikan Jenis Perlindungan

Pilih jenis perlindungan KI berdasarkan karakteristik spesifik inovasi dan tujuan bisnis strategis. Paten untuk teknologi, merek untuk identitas, hak cipta untuk konten kreatif, dan rahasia dagang untuk proses unik.

Manfaatkan Sebagai Aset Strategis

Gunakan perlindungan KI sebagai aset bisnis yang bernilai tinggi untuk pertumbuhan jangka panjang. Optimalkan melalui monetisasi cerdas, kemitraan strategis, dan penegakan hak yang konsisten.

Dukung Model Komersialisasi

Pilih mekanisme perlindungan yang komplementer dengan model bisnis komersialisasi yang ditargetkan, apakah lisensi, penjualan aset, joint venture, atau komersial internal. Sinergi ini memaksimalkan nilai KI.

Kelola Portofolio Secara Aktif

Bangun dan kelola portofolio KI yang terintegrasi dengan strategi bisnis keseluruhan. Review berkala untuk memastikan relevansi dengan kondisi pasar yang berubah dan kebutuhan bisnis yang berkembang.



27 November 2025

Kemenkum Kalsel Siap Dampingi UMKM dengan Skema Valuasi dan Kontrak Kekayaan Intelektual Kekinian



Banjarmasin, Humas_Info — Rangkaian edukasi tiga hari mengenai hilirisasi inovasi dan komersialisasi Kekayaan Intelektual resmi ditutup pada Rabu, 26 November 2025. Pada hari terakhir, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Aji Rifani mengikuti workshop intensif terkait valuasi Kekayaan Intelektual dan penyusunan kontrak komersialisasi, yang menjadi tahapan penting dalam optimalisasi nilai ekonomi sebuah inovasi.

Melalui pelatihan ini, Aji Rifani bersama peserta lainnya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai metode penilaian ekonomi KI, mencakup pendekatan kualitatif hingga kuantitatif. Peserta juga mempraktikkan langsung teknik Discounted Cash Flow (DCF) sebagai metode untuk menghitung nilai ekonomi suatu karya atau teknologi.

Selain valuasi, sesi dilanjutkan dengan penyusunan berbagai dokumen komersialisasi seperti Non-Disclosure Agreement (NDA), perjanjian lisensi, hingga perjanjian alih teknologi yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru di Indonesia.

“Kini kami memiliki kemampuan lengkap untuk menghitung nilai ekonomi sebuah inovasi, dari pendekatan kualitatif hingga kuantitatif,” ujar Aji Rifani.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas selama tiga hari ini membawa dampak signifikan bagi pelayanan KI di daerah.

“Skill yang kami dapatkan benar-benar transformatif. Kini kami siap mendampingi UMKM dan inventor dengan pendekatan yang lebih profesional dan terstruktur,” tambahnya.

Dengan penguatan kompetensi ini, Kemenkum Kalsel berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM, inventor, dan pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat optimalisasi potensi kekayaan intelektual sebagai penggerak ekonomi daerah.



27 November 2025

Dorong SKPD dan Kecamatan di Tanah Laut Aktif Lindungi Inovasi Daerah, Kemenkum Kalsel Aktif Berbagi Informasi



Tanah Laut, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual memberikan sosialisasi Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut pada Rabu (26/11). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai upaya memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya perlindungan KI.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Plt. Kepala Bapperida yang diwakili oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Muhammad Noviansyah. Ia menyampaikan harapan agar SKPD dan Kecamatan dapat semakin aktif dalam menghasilkan inovasi serta memastikan inovasi tersebut mendapat perlindungan yang memadai.

Materi utama disampaikan oleh narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Alvioneda Rennar Putri. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan berbagai bentuk perlindungan KI seperti Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, KIK, dan Hak Cipta. Fokus sosialisasi diarahkan pada Hak Cipta agar inovasi yang dimiliki SKPD dan Kecamatan dapat dicatatkan dan mendapatkan kepastian perlindungan hukum.

Peserta juga diberikan penjelasan mengenai persyaratan pencatatan, tata cara pengisian formulir, serta diajak melakukan penelusuran dan pengecekan nama merek untuk meningkatkan pemahaman praktis. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Muhammad Noviansyah.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Kalsel berharap perangkat daerah di Kabupaten Tanah Laut semakin memahami pentingnya perlindungan KI sehingga setiap inovasi daerah dapat terlindungi dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.



27 November 2025

Prestasi Gemilang! Kementerian Hukum Raih Predikat Unggul IKK 2025



Surabaya - Kementerian Hukum kembali mencatat prestasi membanggakan dalam peningkatan tata kelola kebijakan publik melalui capaian Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Hasil pengukuran ini diumumkan secara resmi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia pada acara penganugerahan yang digelar di Kota Surabaya (25/11).

Tahun ini, pelaksanaan IKK mencatat tingkat partisipasi yang sangat tinggi, yakni 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi. Dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang berpartisipasi, hanya 13 instansi terdiri dari 10 Kementerian dan 3 Lembaga yang berhasil meraih Predikat Unggul, menjadikannya kelompok dengan kinerja tata kelola kebijakan terbaik secara nasional. Kementerian Hukum termasuk dalam jajaran 13 instansi terbaik tersebut.

Penghargaan diterima oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, yang mewakili Menteri Hukum dalam acara tersebut. Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas perumusan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menyampaikan bahwa capaian IKK 2025 harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola kebijakan, bukan sebagai garis finish. “Keberhasilan ini merupakan langkah awal untuk membangun kebijakan yang lebih berkualitas. Hasil pengukuran harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan substansi dan proses kebijakan ke depan,” tegasnya.

Pelaksanaan Pengukuran IKK Tahun 2025 menjadi istimewa karena dilakukan dengan instrumen yang telah disempurnakan, melalui penyederhanaan indikator guna meningkatkan akurasi evaluasi. Objek pengukuran mencakup kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan tahapan baru berupa feedback (umpan balik) yang memperkaya kualitas proses penilaian. Seluruh rangkaian pengukuran berlangsung selama lima bulan sejak kick-off pada 25 Juni 2025, melalui tahapan sosialisasi, pengajuan kebijakan, self-assessment, verifikasi, feedback, dan penilaian akhir.

Acara penganugerahan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, para pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama K/L, serta perwakilan pemerintah daerah, menunjukkan dukungan kuat terhadap agenda peningkatan kualitas kebijakan nasional.

Pencapaian Predikat Unggul ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Hukum terus memperkuat tata kelola kebijakan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mengapresiasi capaian Kementerian Hukum yang berhasil meraih Predikat Unggul pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. “Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kementerian Hukum terus bergerak ke arah tata kelola kebijakan yang semakin profesional, akuntabel, dan berdampak. Bagi kami di daerah, hasil ini menjadi penguat untuk terus menyelaraskan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan agar selaras dengan standar nasional. Kami berkomitmen menerjemahkan capaian ini ke dalam peningkatan kinerja layanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan,” ujar Alex.



27 November 2025

Pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Uji Kompetensi Jabatan Analis Hukum Tahap Wawancara



Banjarmasin, Humas_Info – Dua pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Uji Kompetensi Tahap Wawancara untuk pengisian Jabatan Analis Hukum. Uji kompetensi ini berfokus pada penilaian aspek manajerial, sosial, dan kultural guna mengukur kecakapan, wawasan, serta kesiapan peserta dalam menjalankan tugas pada jabatan fungsional tersebut.

Peserta dari Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel terdiri atas Iyut Mariyanti, yang mengikuti tes pada Rabu (27/11/25), serta Muhammad Riza, yang menjalani tes pada Kamis (28/11/25). Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring.

Dalam pelaksanaannya, Slamet Riyadi, Analis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Pengawas Ujian, memastikan bahwa proses uji kompetensi berlangsung baik, lancar, dan akuntabel, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi pegawai dalam uji kompetensi ini.

“Kami mendukung penuh setiap upaya peningkatan kompetensi pegawai, termasuk melalui uji kompetensi jabatan fungsional. Partisipasi pegawai kami dalam seleksi Analis Hukum ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum Kalimantan Selatan untuk membangun SDM yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Kami berharap hasil terbaik dapat diraih, sehingga semakin memperkuat kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Alex.



27 November 2025

Lantik Notaris Pengganti di Tanah Laut dan Balangan, Meidy: Laksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Profesi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah dua notaris pengganti pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan BerAKHLAK dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya cuti dua notaris yang berhalangan sementara. Berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tanah Laut, notaris Nooriala Hayati menjalani cuti mulai 27 November hingga 31 Desember 2025. Selama masa tersebut, Wahyu Effendy resmi dilantik sebagai notaris pengganti untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu, Keputusan MPDN Kabupaten Tabalong menetapkan bahwa notaris Ayu Ika Novarina akan menjalani cuti pada 10 Desember 2025 sampai 18 Januari 2026. Untuk memastikan layanan kenotariatan tetap berjalan, Damang Praseyo dilantik sebagai notaris pengganti yang melaksanakan tugas di Kabupaten Balangan.

Dalam arahannya, Meidy Firmansyah menegaskan bahwa penunjukan notaris pengganti merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran layanan publik di bidang kenotariatan. Ia meminta agar para notaris pengganti menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta memastikan seluruh layanan dilakukan sesuai ketentuan.

Pelantikan berlangsung tertib dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh para notaris pengganti sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tugas selama masa cuti notaris yang digantikan.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel berharap para notaris pengganti dapat memberikan layanan terbaik demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas layanan hukum kenotariatan.



27 November 2025

Kemenkum Kalsel dan BPHN Bahas Review Laporan Akhir Anev Perda PLP2B



Banjarmasin, Ankum_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum menggelar rapat koordinasi pembahasan dan review Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kegiatan berlangsung pada Kamis, 27 November 2025, secara daring melalui Zoom dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Sri Yunita, yang menyampaikan bahwa penyusunan Anev Perda PLP2B telah memasuki tahap akhir pelaporan. Untuk memastikan kesesuaian laporan dengan standar analisis kebijakan, BPHN hadir sebagai tim pendamping untuk memberikan masukan perbaikan.

Alice Angelica selaku Analis Hukum Muda BPHN dan PIC Pendamping Kanwil Kalsel menjelaskan bahwa laporan akhir Anev merupakan data dukung penting dalam penyampaian kinerja B11. Berdasarkan arahan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, BPHN melakukan pendampingan agar hasil laporan Kanwil dapat memenuhi kelengkapan unsur evaluasi dan memiliki kualitas analisis yang memadai.

Melalui review yang disampaikan, BPHN memberikan sejumlah catatan penting yang perlu diperbaiki oleh tim Kanwil, baik dari sisi teknik penyusunan laporan maupun substansi analisis. Beberapa bagian dinilai memerlukan penajaman argumentasi, penguatan data pendukung, serta penyesuaian struktur agar sejalan dengan format pelaporan Anev yang berlaku.

Rapat ditutup dengan arahan Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum agar seluruh catatan BPHN segera ditindaklanjuti. Tim diberi waktu maksimal lima hari kerja untuk menyempurnakan laporan akhir sebelum disampaikan kembali sebagai hasil final.

Kegiatan berlangsung lancar dan menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memastikan kualitas hasil analisis peraturan daerah berjalan profesional, terukur, dan sesuai pedoman nasional.



29 November 2025

Uji Publik Ranperda Disabilitas: Kemenkum Kalsel Tekankan Pentingnya Layanan Inklusif di Tabalong



Banjarmasin, PPPH_Info - Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Kalsel menghadiri sekaligus memaparkan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Tabalong tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Uji publik digelar pada Kamis (27/11) di Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, H. Akhmad Helmi, yang menyampaikan apresiasi atas tersusunnya ranperda yang merupakan hasil kerja sama legislatif dengan Kemenkum Kalsel. Ia menegaskan bahwa Ranperda ini menjadi salah satu program prioritas DPRD dalam memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Dengan adanya Ranperda ini, kita berharap penyandang disabilitas di Tabalong mendapatkan akses lebih baik pada pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan,” ujarnya.

Dalam pemaparan, Tim Perancang Kemenkum Kalsel menjelaskan bahwa Ranperda ini mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi 18 hak Penyandang Disabilitas, termasuk hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan, habilitasi dan rehabilitasi. Ranperda juga mengusulkan pembentukan Sentra Penyandang Disabilitas sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik di Kabupaten Tabalong.

Sesi diskusi berjalan dinamis. Para peserta uji publik memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan materi Ranperda. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Tabalong menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan publik, seperti sulitnya memperoleh Surat Pernyataan Disabilitas, keterbatasan akses pekerjaan, hingga kebutuhan bantuan alat bantu yang belum terpenuhi.



Uji publik diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah Kabupaten Tabalong, organisasi penyandang disabilitas, jurnalis, Bagian Hukum Setdakab Tabalong, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Kalsel.

Dengan pelaksanaan uji publik ini, diharapkan Ranperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat segera difinalisasi sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum, pelayanan lebih inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tabalong.



29 November 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Wisuda Perdana IBITEK dan Serahkan 15 Surat Pencatatan Ciptaan Tahun 2025



Banjarmasin, Yankum_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menghadiri Wisuda Pertama Program Studi Manajemen dan Akuntansi Program Magister Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan (IBITEK) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Sabtu (29/11).

Kehadiran Kemenkum Kalsel sekaligus menegaskan komitmen dalam mendorong peningkatan literasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Meidy Firmansyah menyerahkan secara simbolis 15 Surat Pencatatan Ciptaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk karya buku yang dihasilkan para dosen IBITEK sepanjang tahun 2025.

Rangkaian kegiatan wisuda diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Hymne, dan Mars IBITEK, kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua Senat. Rektor IBITEK, Yanuar Bachtiar, turut menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat perkembangan akademik dan pencapaian institusi.

Acara berlanjut dengan sambutan Ketua Yayasan LPKNI, Kepala LLDIKTI XI Kalimantan, serta sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum. Momentum akademik ini juga diisi Orasi Ilmiah bertema “Adaptasi Kunci Masa Depan” sebelum memasuki prosesi wisuda dan penutupan sidang oleh Ketua Senat.

Kemenkum Kalsel berharap kerja sama dan sinergi perlindungan Kekayaan Intelektual bersama IBITEK terus meningkat, khususnya dalam mendorong para civitas akademika untuk menghasilkan karya yang inovatif, kreatif, dan terlindungi secara hukum.



30 November 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Pembukaan UMKM Award Banjarbaru 2025



Banjarbaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Layanan Kekayaan Intelektual turut menghadiri Pembukaan Apresiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Award Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Sabtu (29/11).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarbaru ini menjadi ruang apresiasi bagi para pelaku UMKM yang menunjukkan prestasi, inovasi, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang tahun 2025. Pembukaan acara diawali dengan sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru, kemudian secara resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Marhain Rahman.

Acara berlangsung meriah dengan penampilan Fashion Show Produk UMKM yang menampilkan kerajinan lokal, produk tekstil, aksesoris, hingga batik khas Banjarbaru. Karya-karya tersebut diperagakan oleh talent lokal sebagai wujud promosi kreatif terhadap produk unggulan daerah.

Puncak kegiatan ditandai dengan penganugerahan sejumlah kategori penghargaan, yaitu UMKM Terbaik 2025, UMKM Naik Kelas, UMKM Kuliner Terfavorit, serta UMKM Kreatif & Fashion. Para penerima penghargaan mendapatkan apresiasi atas inovasi dan konsistensi dalam mengembangkan usaha serta memberdayakan komunitas lokal.

Tim Layanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel hadir untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan memberikan dukungan terhadap pemberdayaan UMKM, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai nilai tambah usaha.

Di akhir acara, Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan sejumlah program dan rencana pengembangan UMKM untuk tahun 2026 sebagai langkah lanjutan mendorong UMKM lokal naik kelas dan semakin berdaya saing.



30 November 2025

Dukung Sinergitas Bersama Pemerintah Daerah, Kemenkum Kalsel Hadiri Peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tapin



Rantau, Yankum_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan Peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tapin yang diselenggarakan di Pendopo Galuh Bastari, Rantau, pada Minggu (30/11). Kehadiran Kanwil diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, didampingi Analis Kekayaan Intelektual, Markus Riansa, serta Helpdesk AHU, Phandu Wicaksono.

Kegiatan dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2025. Berbagai indikator pembangunan, pencapaian strategis, serta progres program prioritas daerah menjadi fokus utama laporan tersebut.

Bupati Tapin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung perkembangan daerah, serta mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam memajukan Tapin. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan bahwa momentum hari jadi bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat penting untuk menjaga konsistensi pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pelayanan hukum, pembinaan, penyuluhan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Momentum Hari Jadi ke-60 ini kami harapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendorong kemajuan Kabupaten Tapin, sehingga berdampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Meidy.

Peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tapin berlangsung tertib, lancar, dan kondusif, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan tamu undangan lintas sektor.



30 November 2025

Komitmen Kemenkum Kalsel Dorong UMKM dan Pelaku Ekraf Tanah Bumbu Lindungi Karya melalui Sosialisasi HKI 2025



Tanah Bumbu, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tahun 2025 dengan tema “Lindungi Karya, Kuatkan Daya Saing, Ekonomi Kreatif Naik Kelas”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dan berlangsung di Hotel Hill Mart, Simpang Empat, pada Sabtu (29/11).

Kegiatan dibuka oleh Eddy, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disbudporapar Kabupaten Tanah Bumbu, yang menegaskan pentingnya HKI sebagai instrumen perlindungan sekaligus penggerak daya saing ekonomi kreatif daerah.

Puluhan peserta dari berbagai sektor hadir mengikuti sosialisasi ini, mulai dari pelaku UMKM, penulis, seniman, hingga pelaku ekonomi kreatif. Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara hingga berakhirnya sesi fasilitasi.

Pada sesi paparan utama, Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, memaparkan materi HKI secara komprehensif. Penjelasan meliputi konsep dasar HKI, jenis-jenis perlindungan, manfaat pendaftaran, hingga urgensi HKI dalam meningkatkan nilai tambah serta keunggulan kompetitif produk lokal.

Penjelasan berlangsung interaktif dengan menyoroti potensi kekayaan intelektual khas Tanah Bumbu seperti anyaman purun, kopi Simorang, dan madu Sungai Danau. Peserta mendapatkan penjelasan teknis mengenai proses pendaftaran merek dan hak cipta, termasuk contoh kasus dan langkah praktis penyusunan dokumen.



Usai penyampaian materi, sesi tanya jawab berlangsung hidup. Peserta mengajukan pertanyaan seputar mekanisme pendaftaran, perlindungan karya tradisional, hingga biaya serta proses pengajuan untuk produk tertentu.

Pada sesi puncak, dilakukan fasilitasi dan pendampingan langsung, di mana berhasil teridentifikasi 30 karya dan produk yang memenuhi syarat untuk diproses dalam pendaftaran merek dan hak cipta. Para peserta mendapatkan bimbingan awal penyusunan berkas yang ditargetkan dapat diselesaikan pada Desember 2025.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap semakin banyak pelaku usaha dan kreator Tanah Bumbu memahami pentingnya perlindungan HKI sebagai fondasi penguatan ekonomi kreatif daerah.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#bangga
melayani
bangsa**



Terhubung lebih dekat:  YouTube    [kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)